



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT BINA TEKNIK BANGUNAN GEDUNG DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, email:info.ditbtp@pu.go.id

Jakarta, 26 September 2025

Nomor : UM 0102 - Cg /0642
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

Yth.Bapak/Ibu
(daftar terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknik oleh Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Zoom Meeting melalui tautan <https://bit.ly/Bimtekbtbg1>
Acara : Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota merupakan bimbingan teknik mengenai pendekatan penanganan krisis ruang perkotaan melalui warisan budaya dan identitas lokal, sekaligus pemanfaatan bangunan gedung cagar budaya.

Bagi seluruh calon peserta diharapkan untuk dapat melakukan registrasi terlebih dahulu melalui tautan <https://bit.ly/Bimtekbtbg1> pada menu "Registrasi Bimtek Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota". Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Fahmy Luthfie Shahreza (+62-838-2105-4946).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Bina Teknik
Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan,

DIREKTORAT BINA TEKNIK
BANGUNAN GEDUNG DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
Ir. Dian Nawati, M.T.
NIP. 196707251996032001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya;
2. Direktur Jenderal Prasarana Strategis.

Nomor : UMO102-Cg/0642
Tanggal : 26 September 2025

Daftar Undangan
Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota

A. Narasumber

1. Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
2. Punto Wijayanto, S.T, M.T.
3. Ardzuna Sinaga, S.T.
4. Widiyani, S.T, M.T, Ph.D.

B. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PU

1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman;
2. Direktur Pengembangan Kawasan Strategis;
3. Direktur Kepatuhan Intern;
4. Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
5. Kepala Subdirektorat Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
6. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Bangunan Gedung, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
7. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
8. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Bina Penataan Bangunan;
9. Kepala Subdirektorat Perencanaan Program Anggaran, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
10. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Kawasan Strategis, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
11. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
13. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis;
14. Kepala Subdirektorat Keandalan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
15. Kepala Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
16. Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
17. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan dan Pengembangan Profesi, Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
18. Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
19. Kepala Balai Teknik Sains Bangunan, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
20. Kepala Balai Teknik Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan;
21. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Seluruh Indonesia:
 - 1) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Aceh;
 - 2) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Utara;
 - 3) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat;

- 4) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Riau;
- 5) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jambi;
- 6) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sumatera Selatan;
- 7) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bengkulu;
- 8) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Lampung;
- 9) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Bangka Belitung;
- 10) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepulauan Riau;
- 11) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan DKI Jakarta Metropolitan;
- 12) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Barat;
- 13) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah;
- 14) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Di Yogyakarta;
- 15) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Jawa Timur;
- 16) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Banten;
- 17) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Barat;
- 18) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Tengah;
- 19) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Selatan;
- 20) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Timur;
- 21) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalimantan Utara;
- 22) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Bali;
- 23) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Barat;
- 24) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Nusa Tenggara Timur;
- 25) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Utara;
- 26) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tengah;
- 27) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Selatan;
- 28) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara;
- 29) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Gorontalo;
- 30) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Barat;
- 31) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku;
- 32) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku Utara;
- 33) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua Barat;
- 34) Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua.

C. Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum.

1. Direktur Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
2. Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
3. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
4. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
5. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
6. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
7. Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Infrastruktur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga, dan Sosial Budaya;
8. Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
9. Kepala Subdirektorat Wilayah I, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
10. Kepala Subdirektorat Wilayah II, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
11. Kepala Subdirektorat Wilayah III, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;
12. Kepala Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Infrastruktur Dukungan Pendidikan;

D. Perguruan Tinggi

1. Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI);
2. Institut Teknologi Bandung (ITB);
3. Institut Teknologi Nasional (ITENAS);
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS);
5. Universitas Trisakti (USAHKI);
6. Universitas Indonesia (UI);
7. Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR);
8. Universitas Gadjah Mada (UGM);
9. Universitas Brawijaya (UB);
10. Universitas Diponegoro (UNDIP);
11. Universitas Pasundan (UNPAS);
12. Universitas Islam Indonesia (UII);
13. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG);

E. Lembaga/Asosiasi

1. Seluruh Anggota Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI);
2. Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia (IARKI).

Lampiran II

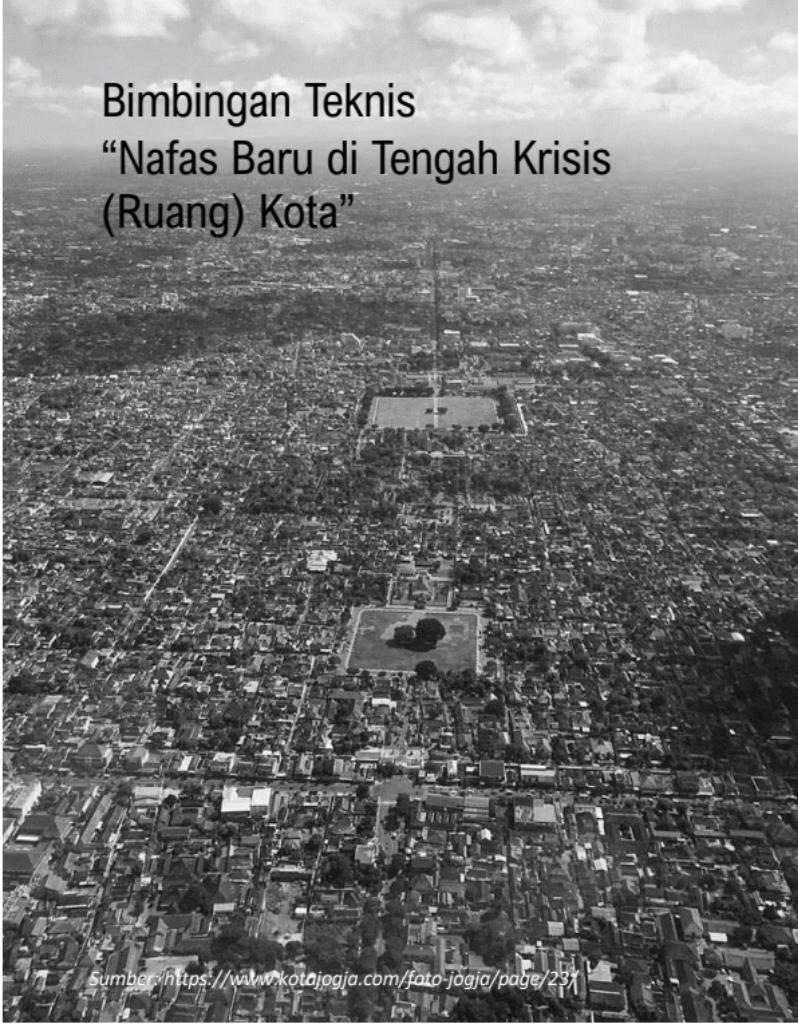
Nomor :
Tanggal :

Rundown Acara
Bimbingan Teknik Nafas Baru di tengah Krisis (Ruang) Kota
Kamis, 2 Oktober 2025

No	Waktu	Durasi (menit)	Materi	Pelaksana	Keterangan	
1	08.00 – 08.15	15	Registrasi peserta	Panitia	Panitia	
2	08.15 – 08.20	5	Pembukaan acara	MC		
3	08.20 – 08.25	5	Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PU	Panitia		
4	08.25 – 08.30	5	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis	Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan	MC.	
5	08.30 – 08.35	5	Sambutan Pembukaan Bimbingan Teknis	Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan		
6	08.35 – 08.40	5	Pre-Test	Peserta		
6	08.40 – 09.00	20	Penyampaian Materi: <i>Nafas baru di tengah Krisis (Ruang) Kota</i>	Materi 1 : Aktivasi Lingkungan Perkotaan berbasis Warisan Budaya	Direktur Bina Penataan Bangunan	Narasumber & Moderator:
7	09.00 – 09.30	30		Materi 2 Ruang Lama : Vibes Baru	Punto Wijayanto, S.T., M.T.	
8	09.30 – 10.00	30		Materi 3 Warisan Budaya ke Placemaking: Menuju Pengembangan Infrastruktur Perkotaan	Ardzuna Sinaga, S.T.	
8	10.00 – 10.30	30		Materi 4 Placemaking untuk Warisan Budaya dan Komunitas	Widiyani, S.T., M.T., Ph.D.	
9	10.30 – 11.30	60		Diskusi dan Tanya Jawab	Pemateri	Moderator
10	11.30 – 11.35	5		Post-Test	Peserta	
11	11.35 – 12.00	25		Penutupan Kegiatan Bimbingan Teknis	Kepala Balai Teknik Tata Bangunan Gedung dan Lingkungan	Penutupan acara oleh MC

Bimbingan Teknis

“Nafas Baru di Tengah Krisis (Ruang) Kota”



Ruang Lama, Vibes Baru

Pendekatan Historic Urban Landscape untuk
Mengintegrasikan Pelestarian Kawasan Bersejarah

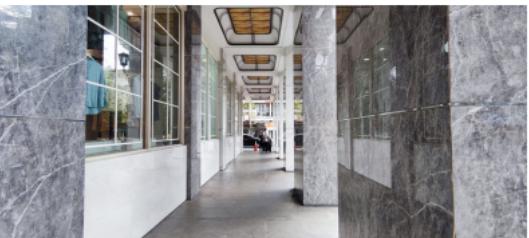
Punto **Wijayanto**
Arsitektur, FTSP Universitas Trisakti

01 Konsep Pelestarian Kota Pusaka

02 Pendekatan HUL dalam Pelestarian Kawasan Pusaka Terpadu

03 Permasalahan dan Tantangan Kawasan
Pusaka, termasuk Pengelolaannya

04 Langkah-langkah



- Kota Pusaka adalah kota atau kabupaten yang mempunyai aset pusaka yang istimewa berupa rajutan pusaka alam dan pusaka budaya yang lestari yang mencakup unsur ragawi (artefak, bangunan, dan kawasan dengan ruang terbukanya) dan unsur kehidupan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya.
- Aset-aset pusaka sering kurang dikenali dan diakui sebagai aset penting dalam pembangunan dan sering di tempatkan pada posisi yang berseberangan dengan perkembangan ekonomi. Akibatnya, kota-kota pusaka terancam untuk kehilangan karakternya dan tumbuh tanpa kepribadian dan menjadi kota yang seragam.
- Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia (2013)

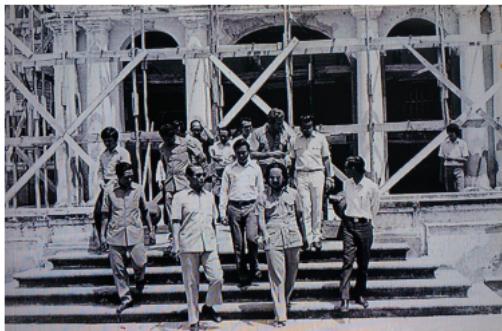
Perkembangan Konsep Pelestarian

Prioritas	1.0 Sector	+	2.0 Factor	+	3.0 Vector
Atribut	Berorientasi Obyek Atribut Benda		Berbasis Kawasan Atribut Benda		Berbasis Lanskap/saujana dan Nilai Penting Atribut Tak Benda
Nilai Penting	Ilmu Pengetahuan, Politik, Estetika, Sejarah, Usia		Ekonomi		Sosial, Ekologi
Pendekatan Manajemen	Preservasi (integritas dan otentisitas)		Transformasi (pelestarian dengan pemanfaatan kembali)		Menginspirasi (pelestarian dengan ko-kreasi)
Fokus Riset	Tunggal		Multidisiplin		Trans-disiplin
Fokus Pengambilan Keputusan	Pakar		Pengembang		Komunitas
Perangkat Manajemen	Pendaftaran, Zonasi (kawasan pelestarian), rencana pemugaran		Proses pengembangan berdasar pemetaan kawasan, program urban rehabilitasi (adaptive reuse)		Prinsip desain (tujuan strategis)

Contoh Perkembangan Pelestarian

Time Line

1527	Kotatua Jakarta
1971	Pelestarian Bermula
1974	Pembukaan Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin
1993	Penetapan Cagar Budaya
2007	Program Revitalisasi Taman Fatahilah (2007-2009)
2011	Pembentuk UP Kawasan Kotatua
2013	Revitalisasi Museum Sejarah Jakarta
2014	Rencana Induk Kawasan Kotatua
2015	UNESCO Tentative List dan Penetapan Kawasan Kotatua Jakarta sebagai Kawasan Cagar Budaya
2017	Renovasi Kali Besar
2021	Low Emission Zone
2027	5 Abad Jakarta



1970-an



2020-an



2000-an



Lapisan Kota *Layers of the City*

Lanskap kota bersejarah adalah hasil dari perlapisan dan terjalannya nilai-nilai budaya dan alam dari waktu ke waktu. Melampaui konsep 'pusat bersejarah', ini mencakup konteks perkotaan yang luas dan pengaturan geografinya.

The historic urban landscape is the result of the layering and intertwining of cultural and natural values over time. Beyond the notion of 'historic centre', it includes the broader urban context and its geographical setting.

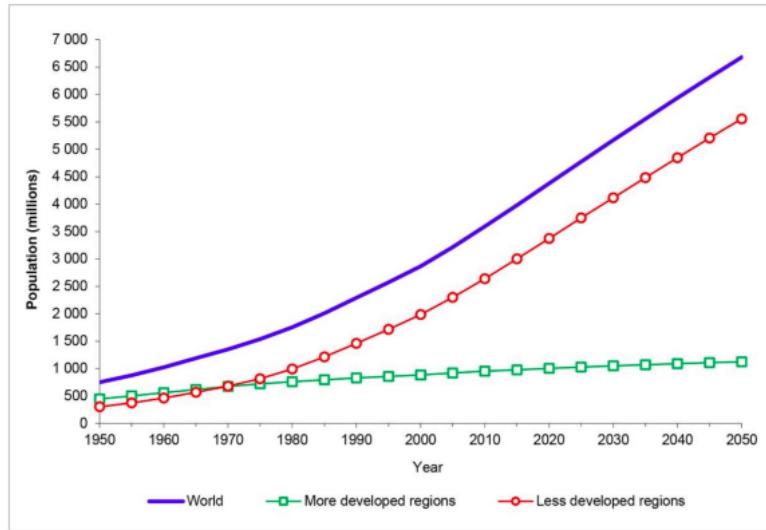


Urbanisasi yang Belum Pernah Terjadi sebelumnya yang Berdampak pada Sumber Daya Budaya

Antara 1950 dan 2018, populasi perkotaan dunia tumbuh lebih dari empat kali lipat.

Akibat urbanisasi yang cepat ini, pada tahun 2007, untuk pertama kalinya, karakter penduduk dunia menjadi lebih perkotaan daripada pedesaan.

World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
(UN 2018, p.9)



1988-2000

- 1988 Terbitnya IPCC (*The Intergovernmental Panel on Climate Change*) dalam Perbaikan Bangsa-Bangsa yang berfungsi memberikan pengaruh terhadap perubahan iklim. Meningkatnya peningkatan konseptual GPR akibat aktivitas manusia menjadi penyebab utama terjadinya situasi rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20.
- 1992 Konvensi Korangeta Kerja Pembatalan iklim Penerokaan Bingege Bangsa (UNFCCC).
- 1994 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change.
- 1995 COP (Conference of Parties) diunggarkan pertama kali di Jerman sebagai pertemuan tahunan global untuk membahas encaman krisis iklim.
- 1997 The Kyoto Protocol dilakukan dalam COP 3 di Kyoto, Jepang dengan mandat bagi negara-negara peserta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

2000-2010

- 2004 UU Lamp-Undang No. 17 Tahun 2004 mengakses siap Indonesia yang turut memfasilitasi Kyoto Protocol.
- 2005 Konsep Net Zero dipelopori, dengan definisi "The notion of a 'net carbon budget' implying net zero emissions of carbon dioxide are necessary to halt global warming".
- 2006 Kota Jakarta bergabung dalam C40 Cities, organisasi wakilkota sejuta dunia yang peduli dengan iklim iklim.
- 2007 COP 13 diselenggarakan di Bali, membahas reduksi emisi gas rumah kaca dan empat isu penting perubahan iklim: mitigasi, penelitian, adaptasi, dan teknologi.
- 2009 Green Building Council Indonesia (GBCI) didirikan, yang berkenanannya memberikan edukasi dan teknologi dalam penerapan praktik lingkungan bertaraf dan memfasilitasi transformasi berkembangan di industri bangunan.



Kita Kemarin: Linimasa Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2011-2024

- 2011 Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dilakukam melalui Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011.
- 2012 Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN MAPRI) 2012-2020. Kementerian PUPR dalam rangka meningkatkan komitmen Kementerian PUPR dalam pengembangan teknologi dan teknologi pendukung untuk mencapai tujuan klimatik dan adaptasi perubahan iklim.
- 2013 Sustentable Development Goals (SDGs) diumumkan dalam Sidang Umum PBB berupa 17 tujuan iklim SDGs dengan isu iklim iklim di Tujuan ke-13, serta di Af Bersih dan Sertifikasi Layak di Tujuan ke-6.
- 2014 Kegiatan Pemuliharaan Tangguh iklim ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, berfokus untuk meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kawasan pemukiman serta meningkatkan daya tahan infrastruktur di lingkungan tersebut.
- 2015 Program Pengembangan Kota Hijau (PPKH) dikembangkan Kementerian PUPR dengan 8 titik untuk mewujudkan kota hijau.
- 2015 Program Peningkatan Penerapan Praktik Lingkungan Berkelanjutan dalam penerapan praktik lingkungan bertaraf dan memfasilitasi transformasi berkembangan di industri bangunan.

- 2016 dan setelah 41% (pemerintah ambisius)iklim mendapat dukungan Internasional.
- 2016 Sustentable Development Goals (SDGs) diumumkan dalam Sidang Umum PBB berupa 17 tujuan iklim SDGs dengan isu iklim iklim di Tujuan ke-13, serta di Af Bersih dan Sertifikasi Layak di Tujuan ke-6.
- 2017 Kegiatan Pemuliharaan Tangguh iklim ini dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, berfokus untuk meningkatkan dampak perubahan iklim terhadap kawasan pemukiman serta meningkatkan daya tahan infrastruktur di lingkungan tersebut.
- 2018 UU New Urban Agenda (NUA) disusupi dalam konferensi PBB Habitat III di Ekuador. NUA merupakan peraturan yang berlaku di seluruh dunia yang mengajak bahwa pulau-pulau perkotaan renah terhadap dampak perubahan iklim.
- 2019 Data Kita Momen Lingkungan Hidup tahun 2017 menunjukkan dari total 62.190 desa yang ada di

Indonesia terdapat 2.400 atau 2.92%, yang tergolong dalam dampak perubahan iklim dan 4.661 atau 5.34%, dalam kategori ketahanan lingkup.

- 2019 Kota Tangerang (Resident City) dipercantik dengan penamaan yakni Jakarta dan Semarang.
- 2019 Masa persiapan untuk iklim iklim di Kalimantan Presiden Joko Widodo: "We must take climate action now, before it's too late". Komitmen Indonesia dalam persiapan menghadapi perubahan iklim, yang tentatif melalui pencapaian dan pengembangan berbagai indikator menuju net zero carbon dan 100 persen energi baru dan terbarukan di tahun 2060.
- 2020 Indonesia merumahkan fokus kegiatan adaptasi perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024.
- 2020 UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) Kementerian PUPR berperan dalam peningkatan ketahanan yang meliputi ketahanan dan pengelolaan lingkungan dalam pembangunan infrastruktur.

- 2021 Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiagaan Rangunan Gedung Hidro (SGH) (Bespaka).
- 2022 Gedung Ujung Palmeruan (PUPE) termasuk dalam Balon Bantuan Bantuan Eksistensi Energy (PBSE) dengan memperbaiki iklim Rangunan Gedung Hidro (SGH).
- 2022 Laporan PBSE "The Global Forest Goals Report 2022" menyatakan bahwa haluan mempunyai peran penting dalam mengatasi krisis global perubahan iklim. Menurut Komitean Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (2021), 2.3% luas hutan dunia berada di wilayah Indonesia.
- 2023 Laporan BRIN memperkirakan setidaknya 111.000 desa di Indonesia berada di ketinggian tergejal.
- 2024 World Water Forum (WWF) ke-10 diadakan di Bali dan mengajukan deklarasi Singklat Nomer Deklarasi keruas mengajukan sejumlah ukuran indikator dalam pengembangan air

Panduan
PENYUSUNAN RTBL
DENGAN PENDekATAN



Melakukan kajian lengkap sumber daya kota: alam, budaya dan manusia.

Menggunakan perencanaan partisipatif & konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memutuskan sasaran & tindakan pelestarian

Memadukan nilai Cagar Budaya perkotaan dan status kerentanannya ke dalam kerangka pembangunan kota yang lebih luas

Memprioritaskan kebijakan dan tindakan pelestarian dalam pembangunan, termasuk pelayanan yang baik.

#2



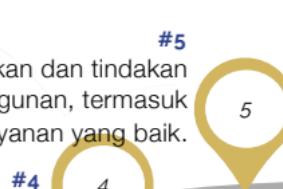
1

#4



2

#5



4

#3



3

#6

Menetapkan kemitraan (publik dan swasta) yang sesuai dan kerangka kerja management loKal

#7



Mengembangkan mekanisme koordinasi dalam berbagai kegiatan antar pelaku yang berbeda



Fukuoka Outcomes (2020)

Membentuk struktur tata kelola atau sistem manajemen yang mengordinasikan berbagai sektor.

Melakukan asesmen awal kondisi pembangunan berkelanjutan, menyelaraskan dengan indikator Agenda 2030, NUA atau Culture|2030.

Menilai kerentanan Cagar Budaya perkotaan akibat tekanan sosial-ekonomi dan dampak perubahan iklim

Mengintegrasikan atribut warisan budaya dan kerentanannya ke dalam rencana pembangunan lintas sektor.

#2

1

#3

Melakukan pemetaan komprehensif sumber daya budaya dan alam, diintegrasikan dalam rencana kota atau rencana pengelolaan

4

5

3

6

7

8

Membentuk kemitraan (publik dan swasta) yang sesuai dan kerangka kerja management loKal

Memperkuat kapasitas berkelanjutan bagi pemangku kepentingan

#7

8

#6

Menentukan prioritas aksi pelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

#8



Pelestarian perkotaan tidak cukup lagi hanya dipahami sebatas menjaga "*historic urban ensembles*" atau lanskap fisik kota bersejarah. Sebaliknya, warisan budaya perlu dilihat sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yang bisa berperan dalam pemulihan (*recovery*) dan ketahanan (*resilience*) kota di masa krisis.

World Heritage City Lab, 2020

Pergeseran paradigma dari pelestarian yang semata-mata menjaga *bentuk fisik* ke arah konservasi yang berorientasi pada

1. **People-centred Recovery.** Perayaan, festival, dan warisan takbenda juga diakui sebagai elemen penting yang menunjang identitas dan kesehatan sosial masyarakat.
2. **Green Recovery.** Lingkungan alami dipandang sebagai bagian dari warisan budaya, sehingga strategi pelestarian harus memadukan alam dan budaya.
3. **Equitable Economic Recovery.** Mengarahkan pemulihan ekonomi lokal agar seimbang: mendukung pengrajin tradisional, wirausaha lokal, serta menghubungkan restorasi bangunan dengan penciptaan lapangan kerja.
4. **Recovering Space and Infrastructure.** Infrastruktur harus berbasis kebutuhan komunitas lokal, sekaligus menjaga *Outstanding Universal Value* (OUV). Pendekatan *Historic Urban Landscape (HUL)* dipakai untuk mengintegrasikan pengelolaan warisan dengan perencanaan kota dalam skala lebih luas.
5. **Digital-powered Recovery.** Teknologi digital menjadi instrumen baru: pasar daring bagi kerajinan lokal, platform tur virtual, serta penciptaan ruang publik digital.



1. People-centred Recovery

Dimensi TakBenda dalam Cagar Budaya

- Intangible Cultural Heritage atau Pusaka Budaya TakBenda
- Disertakan dalam pengelolaan pelestarian Cagar Budaya
- Mendorong keterkaitan nilai TakBenda dengan lokasi atau Cagar Budaya melalui penataan kawasan



3. Green Recovery

Pemulihan berbasis lingkungan

- Mempertahankan ruang hijau halaman
- Orientasi pengetahuan tradisional masyarakat Kotagede
- Penguatan ruang hijau kota

History of the Wapauwé Mosc

The history of the Marquesas as well illustrates the importance of the sea in their lives. They began living along the shores of their archipelago about 300 years ago, when they first came from the Society Islands, where their population had to migrate due to overpopulation. The early settlers were European sailors who had been shipwrecked or stranded on the island. They established a colony in the coast for easier navigation, and eventually moved inland. This movement continued to the interior of the island, where they settled in the village of Hiva Oaia. In 1880, a French naval officer named Jules Dumont d'Urville explored the Marquesas Islands and recorded the names of the main islands. Since then, the names of the main islands have been used for the past 100 years, although the original names of the islands are still used by the local people. It is also interesting to note that the Marquesas Islands are the only place in the world where the name of the island is the same as the name of the capital city. This is because the capital city of the Marquesas Islands is called "Hiva Oaia".

Materials

Other than the Sapele tree other wood species were used in the Mapalane construction.

Sejarah Masjid Wapauwe

misalnya Wijayone yang masih hidup dapat dipelihara, tetapi dengan cara... teknologi lokal seperti yang dilakukan oleh Tenesse dan Tuhan. 1014 Menses, teknologi lokal ini berhasil menghasilkan seorang anak laki-laki. Karena itu kisah ini menjadi bukti bahwa teknologi lokal juga dapat memberikan hasil yang sama dengan teknologi Barat.

A unique witness
to modern techniques
— transition —

The introduction of metallic chisels, bindings



Saksi unik
dari transisi teknik
modern

Saksi unik
dari transisi teknik
modern

Telah mengalih bahasakan hal yang unik di sebagian besar negara, atau teknologi teknik pertambangan masih ini. Penjelasan tentang kelebihan bangunan ini adalah bahwa teknik pertambangan dapat memperbaiki lingkungan sekitar. Walaupun yang terbaik dari kegunaan ini, Masyarakat pada perkembangan dari Jepang dan Indonesia, Marquesa Hispania dan Oba Prancis, teknologi bangunan masih cari peningkatan seiring dengan teknologi yang ada. Dalam hal ini, teknologi teknik pertambangan dapat digunakan pada tahap ho-10-18, dan bisa juga dipakai selama itu tempo bisa diketahui kapasitasnya.

TUKANG 12,
AHLI PERTUKANGAN

The Wugongjie精英 is managed and taken care of by a council of wise called the *Tukang*. *Zhai* (Tukang 12) or *Tukang* *Huo* (in the Kakefu) who are chosen from among the most senior members of each clan of Kalulu, namely the Luanwu, Makan, and Nukurwu. These leaders respected figures are not only mediators but also mediatory chiefs, work with their specific knowledge, and duty.

Ketika bahan Tokang kerusak seling melengkung dan berlubang, maka kerusakan ini disebut dengan kerusakan teknis.

Technical
Reference

The members of the Tokung 12 complement each other or collectively towards maintaining customary law and their traditional knowledge in many areas. The members of Tokung 12 are the leaders of communities and indigenous leaders, who are the leaders of their respective communities. These collectives projects (Tokung) ongoing carried on, which included Chikoren villages before the 1996 Maluku conflict. These projects are carried out by the members of Tokung 12, and the activities are decided by the Tokung 12 following in customary rules.



Ceremonies

11mu

Pengetahuan
— teknis —

berikan. Tujuan konservasi saling melengkung dari
semanusi-samansi hal yang juga akhir dan pada
pembentukan teknik menanak rumput laut digunakan
sebagian besar bahan-bahan yang dikenal
sebagai sumber daya alam (data acak). Mereka
yang pekerjaan yang dilakukan secara golongan
oleh pemukat rumah, yang beragama Islam dan
berusia 18-69 tahun di Pulau Nias. Namun, per-
sepsi mereka terhadap cara cara yang dimiliki



(1) The Kalimantan ceremonial half roof hukuhonan and offerings to an Pemimpinan atap Balai Kalimantan-Bengkayang persatuan untuk pertemuan. - Batasan Kalimantan

3. Equitable Economic Recovery

Pemulihan berbasis budaya

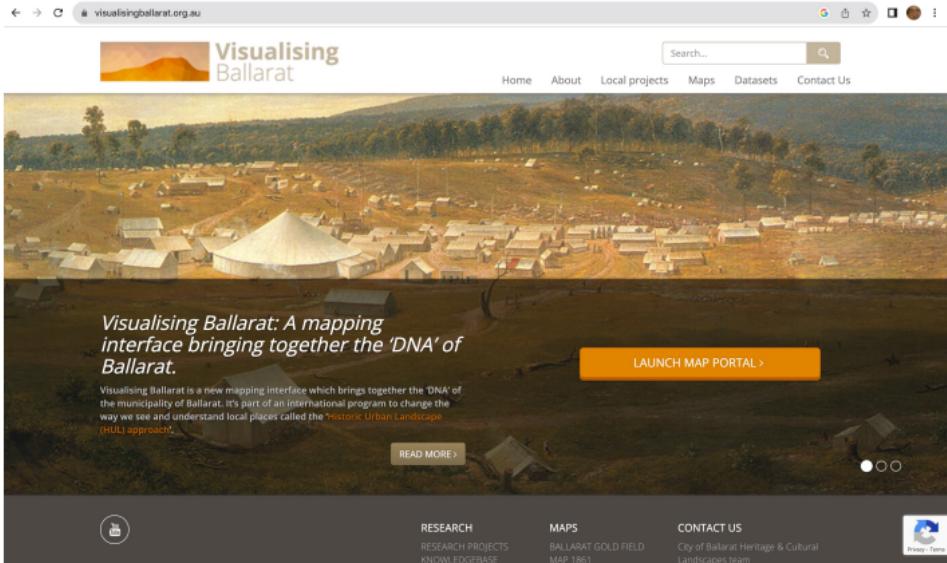
- Pemulihan berbasis pengetahuan tradisional
 - Akses inklusif dan lintas komunitas
 - Pelestarian Masjid Wapauwe sebagai infrastruktur sosial untuk perdamaian dan pembangunan



4. Recovering Space and Infrastructure

Jembatan Memori Kota dan Kebutuhan Kontemporer

-
- Adaptive reuse
 - Infrastruktur lama dipertahankan dengan karakter asli, sekaligus diperkuat
 - M Bloc Space menjadi ruang bersama atau placemaking



5. Digital-powered Recovery

Instrumen Teknologi Digital

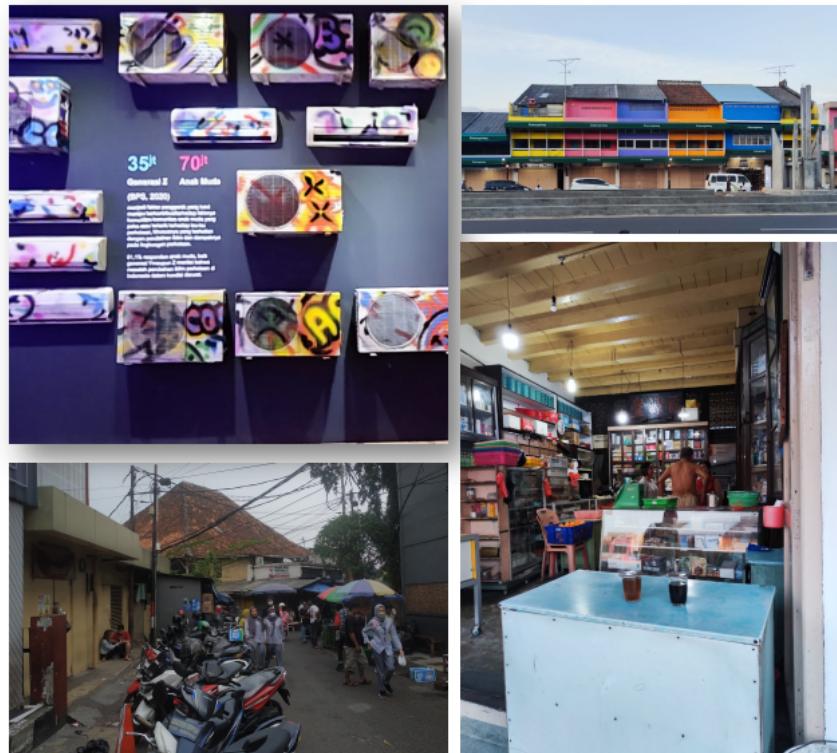
- Teknologi Digital menjadi instrumen baru
- Digitalisasi dipakai untuk riset, dokumentasi, dan inventaris

Cagar Budaya Perkotaan Perlu Dikelola Secara Berkelanjutan Karena...

“Pada tahun 2050, populasi perkotaan dunia diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat, menjadikan urbanisasi sebagai salah satu tren paling transformatif di abad kedua puluh satu.

Populasi, aktivitas ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan, semakin terkonsentrasi di kota-kota, dan ini menimbulkan tantangan keberlanjutan yang sangat besar....”

New Urban Agenda (UN Habitat III, 2016, p. 3)



Rumah 'Landhuis' Cilincing Dihuni Banyak Kepala Keluarga

Potensi dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Pusaka

“Di era globalisasi, kota-kota semakin bersaing satu sama lain, baik secara nasional maupun internasional.

Globalisasi membuat kota-kota serupa..., sementara budaya dan Cagar Budaya adalah sumber daya yang akan selalu membedakan mereka satu sama lain.”

The Historic Urban Landscape Guidebook
(UNESCO 2016, p. 6)



M Bloc Space: Pengembangan Bangunan Cagar Budaya dengan Adaptasi



KNOWLEDGE &
PLANNING TOOLS



COMMUNITY
ENGAGEMENT
TOOLS



REGULATORY
SYSTEMS



FINANCIAL
TOOLS

Elaborasi lebih lanjut...



TERIMA KASIH